

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2018
AUDITED



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN

GROBOGAN, APRIL 2018



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan harus dipertanggungjawabkan setiap tahun yaitu dengan menyusun laporan keuangan. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal (32), bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana laporan yang disajikan sebanyak 5 komponen yang terdiri dari :

- 1.Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2.Laporan Operasional (LO)
- 3.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 4.Neraca
- 5.Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan keuangan tahun 2018 ini masih belum sempurna, meski kami telah berusaha semaksimal mungkin dengan mencurahkan kemampuan yang ada. Oleh karena itu,



kami membuka kesempatan perbaikan yang diperlukan dari berbagai pihak sehingga pada tahun-tahun yang akan datang kami dapat menyusun laporan keuangan seperti yang kita harapkan.

Grobogan,

2019.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Dr. Sutomo No. 5 Telp. (0292) 421940
PURWODADI 58111

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. GROBOGAN

MOCH. SUSILO, SH, MM
NIP. 19650908 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

	Catatan	Anggaran 2018 Rp	Realisasi 2018 Rp	%	Realisasi 2017 Rp
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA					
Pendapatan Pajak Daerah	A.5.1.1.1.a			0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	A.5.1.1.1.b			0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	A.5.1.1.1.c			0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah	A.5.1.1.1.d	0,00	0,00	0,00	320.085.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		0,00	0,00	0,00	320.085.000,00
PENDAPATAN TRANSFER					
Transfer Pemerintah Pusat					
Bagi Hasil Pajak	A.5.1.1.2.a.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Bukan Pajak /Sumber Daya Alam	A.5.1.1.2.a.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	A.5.1.1.2.a.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	A.5.1.1.2.a.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya					
Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	~	0,00
Dana Penyesuaian	A.5.1.1.2.b			~	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	A.5.1.1.2.c			0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil lainnya		0,00	0,00	~	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan					
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	A.5.1.1.2.d			0,00	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah	A.5.1.1.3			~	0,00
Pendapatan Dana Darurat				~	0,00
Pendapatan Lainnya	A.5.1.1.3			~	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		0,00	0,00	~	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00	0,00	320.085.000,00
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	A.5.1.2.1.a	4.402.898.636,00	4.227.005.315,00	96,01	4.195.970.462,00
Belanja Barang	A.5.1.2.1.b	9.182.682.000,00	8.739.023.368,00	95,17	5.111.169.023,00
Belanja Bunga	A.5.1.2.1.c	0,00	0,00	~	0,00
Belanja Subsidi	A.5.1.2.1.d	0,00	0,00	~	0,00
Belanja Hibah	A.5.1.2.1.e	0,00	0,00	~	0,00
Belanja Bantuan Sosial	A.5.1.2.1.f	0,00	0,00	~	0,00
Belanja Bantuan Keuangan			0,00	~	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		13.585.580.636,00	12.966.028.683,00	95,44	9.307.139.485,00
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah	A.5.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	A.5.1.2.2.2	715.207.000,00	695.792.450,00	97,29	1.387.950.680,00
Belanja Gedung dan Bangunan	A.5.1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	984.329.000,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	A.5.1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	61.900.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	A.5.1.2.2.5			0,00	0,00
Belanja Aset Lainnya				~	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL		715.207.000,00	695.792.450,00	97,29	2.434.179.680,00
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	A.5.1.2.3			0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA		14.300.787.636,00	13.661.821.133,00	95,53	11.741.319.165,00

	Catatan	Anggaran 2018 Rp	Realisasi 2018 Rp	%	Realisasi 2017 Rp
TRANSFER					
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN					
Bagi Hasil Pajak Daerah	A.5.1.3.a.			~	0,00
Bagi Hasil Retribusi Daerah	-			~	0,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-			~	0,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan		0,00	0,00	~	0,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	A.5.1.3.b.			~	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	A.5.1.3.b.			~	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		14.300.787.636,00	13.661.821.133,00	95,53	11.741.319.165,00
SURPLUS/(DEFISIT)		(14.300.787.636,00)	(13.661.821.133,00)	95,53	(11.421.234.165,00)
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan SILPA	A.5.1.4.1.1			~	0,00
Pencairan Dana Cadangan	A.5.1.4.1.2			~	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah				~	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				~	0,00
Penerimaan Kembali Piutang	A.5.1.4.1.3			0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan	A.5.1.4.2.1			~	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	A.5.1.4.2.2			~	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	A.5.1.4.2.3			~	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	A.5.1.4.2.4				0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SISA KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN	A.5.1.4.3.	-14.300.787.636,00	-13.661.821.133,00	95,53	-11.421.234.165,00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Purwodadi, 2019
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN

MOCH. SUSILO, SH, MM
NIP. 19650908 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

NO	URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN - LO	0,00	320.085.000,00	(320.085.000,00)	(100,00)
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	320.085.000,00	(320.085.000,00)	(100,00)
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	320.085.000,00	(320.085.000,00)	(100,00)
7	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BEBAN	12.001.251.658,00	9.728.007.723,19	2.273.243.934,81	23,37
17	Beban Pegawai - LO	4.227.750.103,00	4.193.351.132,00	34.398.971,00	0,82
18	Beban Persediaan	3.700.638.073,00	2.751.792.070,00	948.846.003,00	34,48
19	Beban Jasa	2.139.468.023,00	1.278.712.791,00	860.755.232,00	0,00
20	Beban Pemeliharaan	209.465.925,00	143.309.575,00	66.156.350,00	0,00
21	Beban Perjalanan Dinas	842.902.326,00	686.740.794,00	156.161.532,00	0,00
22	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Beban Penyusutan dan Amortisasi	881.027.208,00	674.101.361,19	206.925.846,81	30,70
27	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(12.001.251.658,00)	(9.407.922.723,19)	(2.593.328.934,81)	27,57
31	KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
38	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
39	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(12.001.251.658,00)	(9.407.922.723,19)	(2.593.328.934,81)	27,57
40	POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SURPLUS/DEFISIT-LO	(12.001.251.658,00)	(9.407.922.723,19)	(2.593.328.934,81)	27,57

Purwodadi, 2019
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN

MOCH. SUSILO, SH, MM
 NIP. 19650908 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

No	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2018 Rp	TAHUN 2017 Rp
1.	EKUITAS AWAL	D.1.	7.087.061.516,01	4.388.977.011,53
2.	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	D.2.	(12.001.251.658,00)	(9.407.922.723,19)
3.	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
	Koreksi Aset Tetap		-	(0,33)
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		-	15,00
	Koreksi Aset Lainnya		-	-
	Koreksi Ekuitas Mutasi Aset Tetap SKPD		-	684.773.048,00
	Koreksi Ekuitas lainnya	D.4.	-	
4	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		13.661.821.133,00	11.421.234.165,00
5	EKUITAS AKHIR		8.747.630.991,01	7.087.061.516,01

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Purwodadi, 2019
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN

MOCH. SUSILO, SH, MM
NIP. 19650908 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
NERACA

Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

ASET	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
		Rp	Rp
ASET LANCAR			
Kas di Kas Daerah	5.1.7.A.1.a		0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.1.7.A.1.c		0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.1.7.A.1.b		0,00
Kas di BLUD	5.1.7.A.1.d		0,00
Kas di Bendahara FKTP	5.1.7.A.1.e		0,00
Kas di Bendahara Dana Bos	5.1.7.A.1.F		0,00
Setara Kas			0,00
Investasi Jangka Pendek	5.1.7.A.2		0,00
Piutang Pajak	5.1.7.A.3		0,00
<i>Penyisihan Piutang Pajak</i>			0,00
Piutang Retribusi	5.1.7.A.3.a		0,00
<i>Penyisihan Piutang Retribusi</i>			0,00
Piutang Lainnya	5.1.7.A.4		0,00
<i>Penyisihan Piutang Lainnya</i>			0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.1.7.A.3.b		0,00
<i>Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</i>			0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat			0,00
Beban Dibayar Dimuka			0,00
Persediaan	5.1.7.A.6	2.274.942.687,00	480.464.870,00
JUMLAH ASET LANCAR		2.274.942.687,00	480.464.870,00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemkab	5.1.7.B		0,00
Investasi Permanen Lainnya			0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP			
Tanah	5.1.7.C	320.000.000,00	320.000.000,00
Peralatan dan Mesin	5.1.7.C	5.529.050.165,25	5.140.274.400,19
Gedung dan Bangunan	5.1.7.C	3.390.764.500,00	3.390.764.500,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.7.C	115.350.540,00	115.350.540,00
Aset Tetap Lainnya	5.1.7.C	2.500.000,00	2.500.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.1.7.C	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	5.1.7.C	(3.039.722.923,25)	(2.441.522.099,19)
JUMLAH ASET TETAP		6.317.942.282,00	6.527.367.341,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	5.1.7.D	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	5.1.7.E.1	0,00	0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.1.7.E.2	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.1.7.E.3	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	5.1.7.E.4	138.480.200,00	89.745.200,00
Aset Lain-lain	5.1.7.E.5	30.525.537,01	6.335.236,01
JUMLAH ASET LAINNYA		169.005.737,01	96.080.436,01
JUMLAH ASET		8.761.890.706,01	7.103.912.647,01

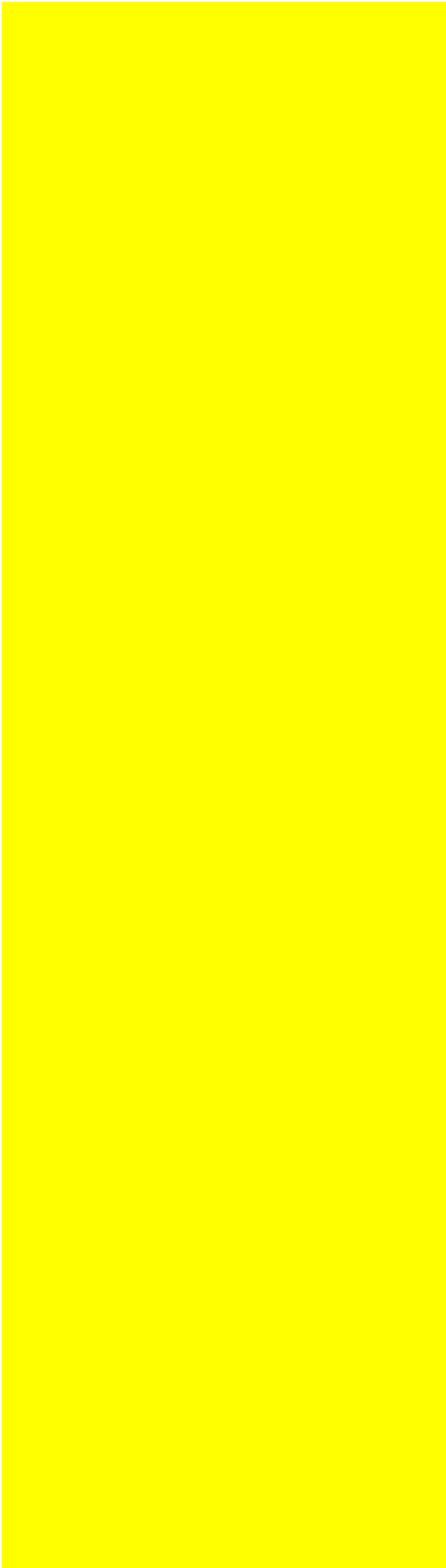
	Catatan	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.1.8.1.a	0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.1.8.1.b	0,00	0,00
Utang Beban	5.1.8.1.c	14.259.715,00	16.851.131,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.1.8.1.d	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		14.259.715,00	16.851.131,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri	5.1.8.2		0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya			0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		14.259.715,00	16.851.131,00
EKUITAS	5.1.9.	8.747.630.991,01	7.087.061.516,01
JUMLAH EKUITAS		8.747.630.991,01	7.087.061.516,01
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		8.761.890.706,01	7.103.912.647,01

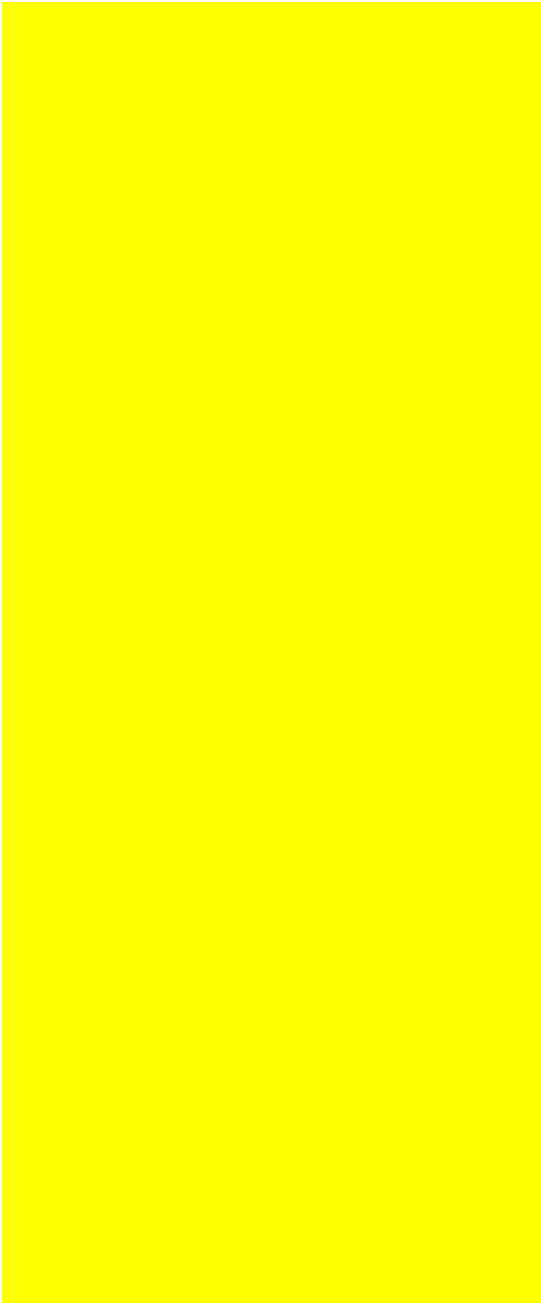
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

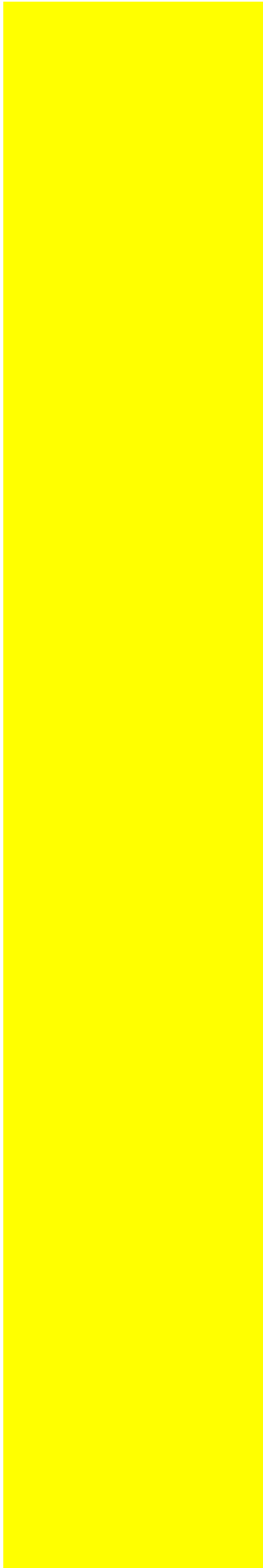
Purwodadi, 2019
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN

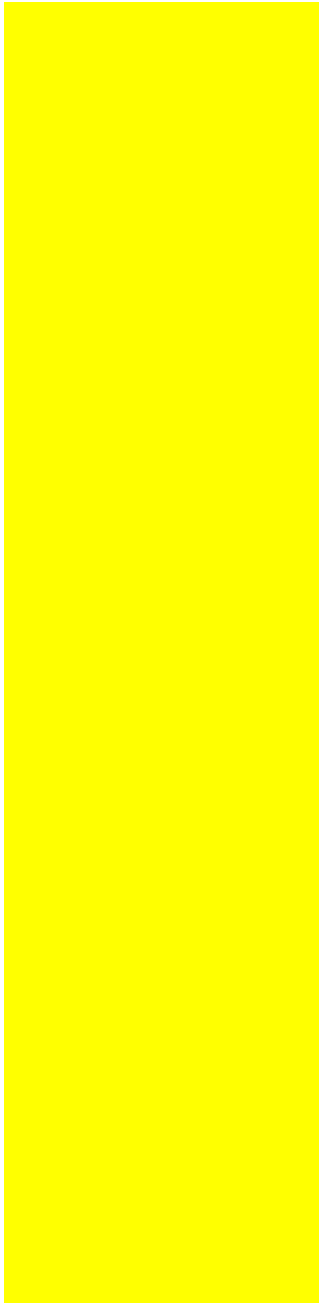
MOCH. SUSILO, SH, MM
NIP. 19650908 199103 1 005

|











CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan keuangan *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* Kabupaten Grobogan Uadited tahun anggaran 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dengan telah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan telah ditetapkannya Peraturan



Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Berbasis Akrua, maka tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas Pemerintah Kabupaten Grobogan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dipercayakannya. Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

Melalui Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan memuat informasi mengenai:

- 1) Penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Operasional (LO);
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 4) Neraca.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Tahun 2015 disusun berdasarkan:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 124 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Grobogan;
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Berbasis Akrual;



19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah

- 3.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 3.1.1 Pendapatan
 - 3.1.2 Belanja
- 3.2 Laporan Operasional
- 3.3 Laporan Perubahan Ekuitas
- 3.4 Neraca

Bab IV Penjelasan atas informasi non keuangan pemerintah daerah

Bab V Penutup.



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018

Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan sebesar Rp0,00 jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp0,00 atau tercapai 0,00 persen.
2. Realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp13.661.821.133,00 lebih rendah Rp638.966.503,00 jika dibandingkan dengan anggaran yaitu sebesar Rp14.300.787.636,00 atau tercapai 95,53 persen.
3. Pada realisasi APBD tahun anggaran 2018 terjadi defisit sebesar Rp13.661.821.133,00. Sedangkan pada pembiayaan terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp0,00 dengan demikian maka terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) sebesar Rp13.661.821.133,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

	APBD Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran
1 Pendapatan dan Belanja			
Pendapatan	-	-	-
Belanja dan Transfer	14.300.787.636,00	13.661.821.133,00	638.966.503,00
Surplus/(Defisit)	(14.300.787.636,00)	(13.661.821.133,00)	638.966.503,00
2 Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
Pembiayaan Netto	-	-	-
Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran	(14.300.787.636,00)	(13.661.821.133,00)	638.966.503,00



Dengan menggunakan anggaran sebagai tolok ukur kinerja, SIKPA TA 2018 berasal dari *over target* pendapatan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen; realisasi Belanja sebesar Rp13.661.821.133,00 atau 95,53 persen; dan dari surplus Pembiayaan Netto sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2018 dibandingkan dengan Tahun 2017

Dibandingkan dengan realisasi pada TA 2017, Pendapatan TA 2018 menurun sebesar Rp320.085.000,00 atau 100 persen. Belanja TA 2018 meningkat sebesar Rp1.920.501.968,00 atau 16,36 persen. Pembiayaan Netto Rp0,00 atau 0,00 persen sedangkan SIKPA meningkat Rp2.240.586.968,00 atau 19,62 persen.

2.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Belanja TA 2018 terealisasi sebesar 95,53 persen dibandingkan dengan anggarannya, sedangkan realisasi belanja pada TA 2017 sebesar 94,74 persen. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target belanja TA 2018 terutama terjadi pada pos Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yaitu Pengadaan Formulir dan Stopmaf Akta Pencatatan Sipil, dan Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini disebabkan oleh *Penghematan karena harga beli lebih kecil dari indeks harga*.



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, bahwa laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi tentang:

- A. Realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
- B. Laporan operasional, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional.
- C. Laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
- D. Neraca, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran (TA) 2018 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari target APBD Perubahan TA. 2018 sebesar Rp0,00. Sesuai dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tidak memungut denda atas keterlambatan pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer pada TA.2018 adalah sebesar Rp13.661.821.133,00 atau 95,53 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA.2018 sebesar Rp14.300.787.636. Realisasi Belanja Daerah TA.2018 mengalami kenaikan Rp1.920.501.968,00 atau 16,36 persen jika dibandingkan



dengan TA.2017. Realisasi Belanja Daerah TA.2018 terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp12.966.028.683,00; Belanja Modal sebesar Rp695.792.450,00; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00 dan Transfer sebesar Rp0,00. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp0,00 dan realisasi Belanja Daerah dan Transfer sebesar Rp13.661.821.133,00; maka terjadi Defisit Anggaran pada TA.2018 sebesar (13.661.821.133,00). Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Netto) pada TA.2018 adalah sebesar Rp0,00 yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp0,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 0,00. Terjadinya Defisit Anggaran dan realisasi Pembiayaan Netto mengakibatkan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) TA.2018 sebesar (13.661.821.133,00).

Untuk lebih jelasnya perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama TA. 2018 dan realisasi TA. 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut:

URAIAN	2018		2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-
Pendapatan Transfer	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-	320.085.000,00
Jumlah Pendapatan	-	-	320.085.000,00
Belanja			
Belanja Oprasi	13.585.580.636,00	12.966.028.683,00	9.307.139.485,00
Belanja Modal	715.207.000,00	695.792.450,00	2.434.179.680,00
Belanja Tidak Terduga	-	-	-
Transfer	-	-	-
Jumlah Belanja	14.300.787.636,00	13.661.821.133,00	11.741.319.165,00
Surplus/(Defisit)	(14.300.787.636,00)	(13.661.821.133,00)	(11.421.234.165,00)
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
Pembiayaan Netto	-	-	-
Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran	(14.300.787.636,00)	(13.661.821.133,00)	(11.421.234.165,00)

Uraian selengkapnya dari masing-masing akun laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

3.1.1 PENDAPATAN-LRARp0,00

Pendapatan-LRA, adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode



tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran (TA) 2018 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari target APBD Perubahan TA 2018 sebesar Rp0,00.

3.1.2 BELANJA – (LRA)Rp13.661.821.133,00

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening bendahara pengeluaran/kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi Belanja pada TA 2018 adalah sebesar Rp13.661.821.133,00 yang berarti mencapai 95,53 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp14.300.787.636,00. Berdasarkan jenisnya, Belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Transfer. Perbandingan antara anggaran dan realisasi Belanja TA 2018 serta realisasi TA 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Belanja	2018		2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	13.585.580.636,00	12.966.028.683,00	9.307.139.485,00
2	Belanja Modal	715.207.000,00	695.792.450,00	2.434.179.680,00
3	Belanja Tidak Terduga	-	-	-
4	Transfer	-	-	-
Jumlah Belanja		14.300.787.636,00	13.661.821.133,00	11.741.319.165,00

1. BELANJA OPERASI.....Rp12.966.028.683,00

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Realisasi Belanja Operasi TA 2018 adalah sebesar Rp12.966.028.683,00 yang berarti mencapai 95,44 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp13.585.580.636,00. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja



Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Belanja Operasi:	2018		2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	4.402.898.636,00	4.227.005.315,00	4.195.970.462,00
Belanja Barang	9.182.682.000,00	8.739.023.368,00	5.111.169.023,00
Belanja Bunga	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	13.585.580.636,00	12.966.028.683,00	9.307.139.485,00

A. Belanja Pegawai.....Rp4.227.005.315,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 adalah sebesar Rp4.227.005.315,00 yang berarti mencapai 96,01 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp4.402.898.636,00. Hal ini berarti Belanja Pegawai lebih kecil Rp31.034.853,00 atau 0,74 persen dari realisasi TA 2017. Belanja pegawai meliputi Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No.	Belanja Pegawai:	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Gaji dan Tunjangan	3.490.648.636,00	3.344.355.315,00	95,81	(146.293.321,00)
	<i>Gaji PNS</i>	3.490.648.636,00	3.344.355.315,00	95,81	(146.293.321,00)
2	Tambahan Penghasilan PNS	912.250.000,00	882.650.000,00	96,76	(29.600.000,00)
	<i>Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Beban Kerja</i>	912.250.000,00	882.650.000,00	96,76	(29.600.000,00)
	Jumlah Belanja Pegawai	4.402.898.636,00	4.227.005.315,00	96,01	(175.893.321,00)

1) Realisasi Gaji dan Tunjangan sebesar Rp3.344.355.315,00 atau 95,81 persen dari anggarannya sebesar Rp3.490.648.636,00. Terdiri dari :



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Gaji dan Tunjangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.620.248.620,00	2.550.507.636,00	97,34	(69.740.984,00)
2	Tunjangan Keluarga	258.070.661,00	251.775.342,00	97,56	(6.295.319,00)
3	Tunjangan Jabatan	218.190.000,00	207.750.000,00	95,22	(10.440.000,00)
4	Tunjangan Fungsional	-	-	-	-
5	Tunjangan Fungsional Umum	89.720.000,00	89.650.000,00	99,92	(70.000,00)
6	Tunjangan Beras	170.911.200,00	143.246.760,00	83,81	(27.664.440,00)
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.290.027,00	3.942.533,00	91,90	(347.494,00)
8	Pembulatan Gaji	38.346,00	35.372,00	92,24	(2.974,00)
9	Iuran Jaminan Kesehatan	102.563.983,00	71.827.593,00	70,03	(30.736.390,00)
20	Asuransi Ketenagakerjaan	26.615.799,00	25.620.079,00	96,26	(995.720,00)
	Jumlah Gaji dan Tunjangan	3.490.648.636,00	3.344.355.315,00	95,81	(146.293.321,00)

2) Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp882.650.000,00 atau 96,76 persen dari anggarannya sebesar Rp912.250.000,00. Rincian Tambahan Penghasilan PNS secara lengkap disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tambahan Penghasilan PNS	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	912.250.000,00	882.650.000,00	96,76	(29.600.000,00)
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	-	-	-	-
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	-	-	-	-
4	Tambahan Penghasilan Guru PNS	-	-	-	-
5	Tambahan Penghasilan Profesi Guru PNS	-	-	-	-
	Jumlah Tambahan Penghasilan PNS	912.250.000,00	882.650.000,00	96,76	(29.600.000,00)

B. Belanja Barang dan Jasa.....Rp8.739.023.368,00

Realisasi Belanja Barang TA 2018 adalah sebesar Rp8.739.023.368,00 yang berarti mencapai 95,17 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp9.182.682.000,00. Belanja Barang terdiri atas belanja sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Belanja Barang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	3.558.132.600,00	3.461.427.890,00	97,28
2	Belanja Bahan/Material	60.532.000,00	57.013.600,00	94,19
3	Belanja Jasa Kantor	437.563.000,00	411.459.227,00	94,03
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	46.729.925,00	93,46
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.709.459.000,00	1.539.774.400,00	90,07
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
7	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.062.000,00	2.062.000,00	
8	Belanja Makanan dan Minuman	389.760.000,00	361.830.000,00	92,83
9	Belanja Pakaian Kerja	2.500.000,00	2.330.000,00	93,20
10	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	74.680.000,00	72.740.000,00	97,40
11	Belanja Perjalanan Dinas	909.212.400,00	842.902.326,00	92,71
12	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
13	Belanja Pemeliharaan	165.000.000,00	162.736.000,00	98,63
14	Belanja Jasa Konsultasi	178.020.000,00	169.651.000,00	95,30
15	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.222.491.000,00	1.201.197.000,00	98,26
16	Belanja Honorarium PNS	404.770.000,00	388.670.000,00	96,02
Jumlah Belanja Barang		9.182.682.000,00	8.739.023.368,00	95,17

1. Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp3.461.427.890,00 atau 97,28 persen dari anggarannya sebesar Rp3.558.132.600,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Bahan Pakai Habis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.516.902.600,00	3.423.179.890,00	97,34
2	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	15.000.000,00	13.918.500,00	92,79
3	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	12.550.000,00	10.937.500,00	87,15
4	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	13.680.000,00	13.392.000,00	97,89
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis		3.558.132.600,00	3.461.427.890,00	97,28

2. Realisasi Belanja Bahan/Material sebesar Rp57.013.600,00 atau 94,19 persen dari anggarannya sebesar Rp60.532.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Belanja Bahan/Material	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	21.252.000,00	21.120.000,00	99,38	(132.000,00)
2	Belanja Perlengkapan Pelatihan	39.280.000,00	35.893.600,00	91,38	(3.386.400,00)
	Jumlah Belanja Bahan/Material	60.532.000,00	57.013.600,00	94,19	(3.518.400,00)

3. Realisasi Belanja Jasa Kantor sebesar Rp411.459.227,00 atau 67,23 persen dari anggarannya sebesar Rp437.563.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Jasa Kantor	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Telepon	7.951.500,00	4.753.538,00	59,78	(3.197.962,00)
2	Belanja Air	7.299.000,00	5.557.250,00	76,14	(1.741.750,00)
3	Belanja Listrik	127.764.500,00	127.712.169,00	99,96	(52.331,00)
4	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	61.260.000,00	51.820.000,00	84,59	(9.440.000,00)
5	Belanja Surat Kabar/Majalah	13.440.000,00	11.040.000,00	82,14	(2.400.000,00)
6	Belanja Kawat/Faximil/Internet	75.000.000,00	68.625.270,00	91,50	(6.374.730,00)
7	Belanja Jasa Dokumentasi	2.550.000,00	2.000.000,00	78,43	(550.000,00)
8	Belanja Jasa Dekorasi	1.298.000,00	821.000,00	63,25	(477.000,00)
9	Belanja Jasa Siaran Radio	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	-
10	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	96.000.000,00	94.130.000,00	98,05	(1.870.000,00)
	Jumlah Belanja Jasa Kantor	437.563.000,00	411.459.227,00	94,03	(26.103.773,00)

4. Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar Rp46.729.925,00 atau 93,46 persen dari anggarannya sebesar Rp50.000.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Jasa Service	10.500.000,00	9.770.000,00	93,05	(730.000,00)
2	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.500.000,00	23.457.750,00	99,82	(42.250,00)
3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	-
4	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.000.000,00	4.502.175,00	64,32	(2.497.825,00)
	Jumlah Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	46.729.925,00	93,46	(3.270.075,00)



5. Realisasi Belanja Cetak dan Pengandaan sebesar Rp1.539.774.400,00 atau 90,07 persen dari anggarannya sebesar Rp1.709.459.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Cetak dan Pengandaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Cetak	1.539.565.000,00	1.388.648.000,00	90,20
2	Belanja Pengandaan	51.764.000,00	44.941.400,00	86,82
3	Belanja Penjilidan	80.030.000,00	72.285.000,00	90,32
4	Belanja Spanduk	38.100.000,00	33.900.000,00	88,98
Jumlah Belanja Cetak dan Pengandaan		1.709.459.000,00	1.539.774.400,00	90,07

6. Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas sebesar Rp3.500.000,00 atau 100,00 persen dari anggarannya sebesar Rp3.500.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	-
Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	-

7. Realisasi Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kantor sebesar Rp2.062.000,00 atau 100,00 persen dari anggarannya sebesar Rp2.062.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Sewa Tenda	1.062.000,00	1.062.000,00	100,00	-
2	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		2.062.000,00	2.062.000,00	100,00	-

8. Realisasi Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp361.830.000,00 atau 92,83 persen dari anggarannya



sebesar Rp389.760.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Makanan dan Minuman	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	172.348.000,00	156.375.000,00	90,73	(15.973.000,00)
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	97.215.000,00	94.935.000,00	97,65	(2.280.000,00)
3	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	43.087.000,00	35.390.000,00	82,14	(7.697.000,00)
4	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	77.110.000,00	75.130.000,00	97,43	(1.980.000,00)
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman		389.760.000,00	361.830.000,00	92,83	(27.930.000,00)

9. Realisasi Belanja Pakaian Kerja sebesar Rp2.330.000,00 atau 93,20 persen dari anggarannya sebesar Rp2.500.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Pakaian Kerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Pengadaan Pakaian SATPAM dan Pembersih	2.500.000,00	2.330.000,00	93,20	(170.000,00)
Jumlah Belanja Pakaian Kerja		2.500.000,00	2.330.000,00	93,20	(170.000,00)

10. Realisasi Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu sebesar Rp72.740.000,00 atau 96,08 persen dari anggarannya sebesar Rp74.680.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Pakaian Batik Tradisional	40.600.000,00	39.440.000,00	97,14	(1.160.000,00)
2	Belanja Pakaian Olahraga	34.080.000,00	33.300.000,00	97,71	(780.000,00)
Jumlah Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu		74.680.000,00	72.740.000,00	97,40	(1.940.000,00)

11. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp842.902.326,00 atau 92,71 persen dari anggarannya sebesar Rp909.212.400,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	403.415.000,00	388.145.250,00	96,21	(15.269.750,00)
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	334.250.000,00	298.595.544,00	89,33	(35.654.456,00)
	Jumlah Belanja Perjalanan Dinas	737.665.000,00	686.740.794,00	93,10	(50.924.206,00)

12. Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS sebesar Rp15.000.000,00 atau 100,00 persen dari anggarannya sebesar Rp15.000.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
	Jumlah Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-

13. Realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp162.736.000,00 atau 98,63 persen dari anggarannya sebesar Rp165.000.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Pemeliharaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.000.000,00	138.497.000,00	98,93	(1.503.000,00)
2	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	25.000.000,00	24.239.000,00	96,96	(761.000,00)
	Jumlah Belanja Pemeliharaan	165.000.000,00	162.736.000,00	98,63	(2.264.000,00)

14. Realisasi Belanja Jasa Konsultasi sebesar Rp169.651.000,00 atau 95,30 persen dari anggarannya sebesar Rp178.020.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Belanja Jasa Konsultasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	19.340.000,00	19.206.000,00	99,31	(134.000,00)
2	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	129.340.000,00	122.995.000,00	95,09	(6.345.000,00)
3	Belanja Jasa Pihak Ketiga	29.340.000,00	27.450.000,00	93,56	(1.890.000,00)
	Jumlah Belanja Jasa konsultasi	178.020.000,00	169.651.000,00	95,30	(8.369.000,00)

15. Realisasi Belanja Honorarium PNS sebesar Rp388.670.000,00 atau 96,02 persen dari anggarannya sebesar Rp404.720.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Honorarium PNS	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	379.800.000,00	368.100.000,00	96,92	(11.700.000,00)
2	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	15.455.000,00	12.540.000,00	81,14	(2.915.000,00)
3	Belanja Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	9.515.000,00	8.030.000,00	84,39	(1.485.000,00)
	Jumlah Belanja Honorarium PNS	404.770.000,00	388.670.000,00	96,02	(16.100.000,00)

16. Realisasi Belanja Honorarium Non PNS sebesar Rp1.201.197.000,00 atau 98,26 persen dari anggarannya sebesar Rp1.222.491.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Honorarium Non PNS	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Honorarium Tenaga Lain-lain	1.048.941.000,00	1.040.197.000,00	99,17	(8.744.000,00)
2	Belanja Honorarium Tenaga Tidak Tetap	173.550.000,00	161.000.000,00	92,77	(12.550.000,00)
	Jumlah Belanja Honorarium Non PNS	1.222.491.000,00	1.201.197.000,00	98,26	(21.294.000,00)



2. BELANJA MODAL.....Rp695.792.450,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal TA 2018 adalah sebesar Rp695.792.450,00 atau 97,29 persen dari anggarannya sebesar Rp715.207.000,00. Realisasi belanja modal terdiri dari:

No.	Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	715.207.000,00	695.792.450,00	97,29	(19.414.550,00)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		715.207.000,00	695.792.450,00	97,29	(19.414.550,00)

- 1) Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari anggarannya sebesar Rp0,00.
- 2) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp695.792.450,00 atau 97,26 persen dari anggarannya sebesar Rp715.207.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	87.160.000,00	83.760.000,00	96,10	(3.400.000,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	19.342.000,00	19.067.400,00	98,58	(274.600,00)
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	530.724.000,00	525.939.550,00	99,10	(4.784.450,00)
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	48.126.000,00	37.215.500,00	77,33	(10.910.500,00)
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	29.855.000,00	29.810.000,00	99,85	(45.000,00)
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		715.207.000,00	695.792.450,00	97,29	(19.414.550,00)



- 3) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,00 atau 0 persen dari anggarannya sebesar Rp0,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:
- 4) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp0,00 atau 0 persen dari anggarannya sebesar Rp0,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Penganggaran Belanja Modal mengikuti kebijakan akuntansi mengenai nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai minimum kapitalisasi aset tetap adalah batasan besaran minimum belanja per unit barang untuk dianggarkan sebagai Belanja Modal. Pembelian barang yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam Belanja Barang. Pada tahun anggaran 2018 belanja yang menghasilkan aset tidak hanya berasal dari belanja modal saja, tetapi juga kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp47.415.000,00 dan dari belanja pegawai sebesar Rp1.320.000,00. Sedangkan belanja yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp0,00. Dihilangkan kepada masyarakat sebesar Rp0,00 dan belanja aset dengan nilai dibawah satuan minimal kapitalisasi aset tetap sebesar Rp0,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Kapitalisasi dari Belanja Pegawai	Kapitalisasi dari Belanja Barang	Belanja Modal	Dihilangkan	Tidak Dikapitalisasi	Dibawah Nilai Kapitalisasi
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Lainnya	1.320.000,00	47.415.000,00	-	-	-	-
Jumlah	1.320.000,00	47.415.000,00	-	-	-	-



3. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA)(Rp13.661.821.133,00)

Berdasarkan Surplus/Defisit Anggaran sebesar (Rp13.661.821.133,00) dan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp0,00 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) / Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) TA 2018 sebesar (Rp13.661.821.133,00). Selanjutnya disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Uraian	Tahun 2018		Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan dan Belanja			
	Pendapatan	-	-	320.085.000,00
	Belanja dan Transfer	14.300.787.636,00	13.661.821.133,00	9.576.614.053,00
	Surplus/(Defisit)	(14.300.787.636,00)	(13.661.821.133,00)	(9.256.529.053,00)
2	Pembiayaan			
	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Pembiayaan Neto	-	-	-
	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran	(14.300.787.636,00)	(13.661.821.133,00)	(9.256.529.053,00)

Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun 2018 sebesar (Rp13.661.821.133,00) tersebut berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan dan pembiayaan netto yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Dari target pendapatan sebesar Rp0,00 realisasinya sebesar Rp0,00 sehingga terdapat kelebihan penerimaan dari target pendapatan sebesar Rp0,00. Tiga komponen terbesar kelebihan penerimaan dari target pendapatan antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah, yaitu Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp0,00; Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp0,00 dan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, yaitu Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebesar Rp0,00.

Dari anggaran Belanja dan Transfer sebesar Rp14.300.787.636,00 realisasinya sebesar Rp13.661.821.133,00.



3.2 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/(Defisit) operasional Pemerintah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2018.

1. **PENDAPATAN LO.....Rp0,00**

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Grobogan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran 2018 dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), atau
- Pendapatan telah direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pendapatan-LO diukur berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Realisasi pendapatan-LO tahun 2018 sebesar Rp0,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp320.085.000,00 atau 100 persen jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan-LO tahun 2017. Pendapatan LO mengalami penurunan karena pemberhentian pemberian sanksi administrasi denda keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua



atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi Kependudukan.

Realisasi Pendapatan-LO tahun 2018 dan tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Pendapatan-LO	Tahun 2018	Tahun 2017	Kenaikan/(Penurunan)
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	-	320.085.000,00	(320.085.000,00)
2	Pendapatan Transfer-LO	-	-	-
3	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	-	-	-
4	Suprlus Non Operasional-LO	-	-	-
5	Pendapatan Luar Biasa-LO	-	-	-
Jumlah Pendapatan-LO		-	320.085.000,00	(320.085.000,00)

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO.....Rp0,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2018 dan tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Pendapatan Asli Daerah-LO	Tahun 2018	Tahun 2017	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	-	-	-
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	-	-	-
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	-	-	-
4	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	-	320.085.000,00	(320.085.000,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO		-	320.085.000,00	(320.085.000,00)

Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2018 sebesar Rp0,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp320.085.000,00 atau 100 persen jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2017.

Pendapatan Asli Daerah-LO pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tahun 2018 tidak mengelola pendapatan asli daerah sehingga mengalami penurunan sebesar Rp320.085.000,00 atau 100 persen jika



dibandingkan dengan Lain-lain PAD Yang Sah-LO tahun 2017.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan denda atas pelanggaran perda - LO	-	320.085.000,00	(320.085.000,00)
	Jumlah	-	320.085.000,00	(320.085.000,00)

Pencapaian Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO sebesar Rp0,00 berasal dari Denda atas Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan.

1) Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp0,00

Pendapatan Transfer-LO berasal dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan tidak mendapatkan transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

2) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO sebesar..... Rp0,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO berasal dari pendapatan hibah baik berupa barang maupun dalam bentuk uang pada beberapa SKPD. Pada Tahun 2018 Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan tidak mempunyai lain-lain pendapatan yang sah-LO.

3) Surplus Non Operasional-LO sebesar Rp0,00

- i. Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO sebesar Rp00,00 dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak melakukan penjualan/penghapusan aset tetap dan aset lainnya.
- ii. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan sebesar Rp0,00



- iii. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan sebesar Rp0,00

2. BEBAN LO..... Rp12.001.251.658,00

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang disebabkan oleh timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya pengeluaran.

Beban diukur dan dicatat sebesar

- Kewajiban yang harus ditunaikan dimasa yang akan datang,
- Nilai aset yang dikonsumsi,
- Nilai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Realisasi beban-LO tahun 2018 dan tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Operasi	12.001.251.658,00	9.728.007.723,19	2.273.243.934,81
2	Beban Transfer	-	-	-
3	Defisit Non Operasional	-	-	-
4	Beban Luar Biasa	-	-	-
	Jumlah	12.001.251.658,00	9.728.007.723,19	2.273.243.934,81

Beban-LO tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.273.243.934,81 atau 23,37 persen jika dibandingkan dengan Beban-LO tahun 2017. Dalam penjelasan CALK tentang Beban-LO berikut akan diuraikan beban berdasarkan jenisnya yang terdiri dari Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional, dan Beban Luar Biasa.

a. Beban Operasi..... Rp12.001.251.658,00

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai LO, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban



Bantuan Sosia, Beban Penyusutan dan Amortisasi dan lain-lain. Beban Operasi tahun 2018 sebesar Rp12.001.251.658,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.273.243.934,81 atau 23,37 persen jika dibandingkan dengan Beban Operasi tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

No.	Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Pegawai - LO	4.227.750.103,00	4.193.351.132,00	34.398.971,00
2	Beban Persediaan	3.700.638.073,00	2.751.792.070,00	948.846.003,00
3	Beban Jasa	2.139.468.023,00	1.278.712.791,00	860.755.232,00
4	Beban Pemeliharaan	209.465.925,00	143.309.575,00	66.156.350,00
5	Beban Perjalanan Dinas	842.902.326,00	686.740.794,00	156.161.532,00
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	881.027.208,00	674.101.361,19	206.925.846,81
	Jumlah	12.001.251.658,00	9.728.007.723,19	2.273.243.934,81

1. Beban Pegawai-LO.....Rp4.227.750.103,00

Tahun 2018 sebesar Rp4.227.750.103,00 mengalami kenaikan sebesar Rp34.398.971,00 atau persen jika dibandingkan dengan Beban Pegawai-LO tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Beban Pegawai - LO

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Gaji dan Tunjangan -LO	3.345.100.103,00	3.405.301.132,00	(60.201.029,00)
2	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	882.650.000,00	788.050.000,00	94.600.000,00
	Jumlah	4.227.750.103,00	4.193.351.132,00	34.398.971,00

Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp4.227.005.315,00 sedangkan Beban Pegawai-LO sebesar Rp4.227.750.103. Jadi terdapat selisih sebesar Rp744.788 yang disebabkan karena :

1. Utang pegawai selama tahun 2018 sebesar Rp1.192.490,00 yang menambah beban pegawai-LO.
2. Utang pegawai sebelum tahun 2018 yang dibayar pada tahun 2018 sebesar Rp447.702,00 yang mengurangi beban pegawai-LO.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



No	Uraian	LRA	Debet	Kredit		LO
			Utang Beban Pegawai th.2018	Utang Beban Pegawai th.sebelumnya yg dibayar th.2018	Reclas Beban Kredit	
1	Beban Gaji dan Tunjangan	3.344.355.315,00	1.192.490,00	447.702,00	-	3.345.100.103,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	882.650.000,00	-	-	-	882.650.000,00
	Jumlah	4.227.005.315,00	1.192.490,00	447.702,00	-	4.227.750.103,00

2. Beban Barang dan Jasa.....Rp6.892.474.347,00

Tahun 2018 sebesar Rp6.892.474.347,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.031.919.117,00 atau 41,80 persen jika dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Beban Barang dan Jasa - LO

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	Kenaikan/(Penurunan)
1	Beban Persediaan	3.700.638.073,00	2.751.792.070,00	948.846.003,00
2	Beban Jasa	2.139.468.023,00	1.278.712.791,00	860.755.232,00
3	Beban Pemeliharaan	209.465.925,00	143.309.575,00	66.156.350,00
4	Beban Perjalanan Dinas	842.902.326,00	686.740.794,00	156.161.532,00
	Jumlah	6.892.474.347,00	4.860.555.230,00	2.031.919.117,00

- 1) **Beban Persediaan-LO** tahun 2018 sebesar Rp3.700.638.073,00 mengalami kenaikan sebesar Rp948.846.003,00 atau 34,48 persen jika dibandingkan dengan Beban Persediaan-LO tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Beban Persediaan-LO

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	Kenaikan/(Penurunan)
1	Beban Bahan Pakai Habis	2.490.443.673,00	1.923.913.240,00	566.530.433,00
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	57.013.600,00	28.725.000,00	28.288.600,00
3	Beban Cetak dan Penggandaan	1.153.180.800,00	799.153.830,00	354.026.970,00
4	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	-
	Jumlah	3.700.638.073,00	2.751.792.070,00	948.846.003,00



Belanja Persediaan-LRA sebesar Rp5.495.115.890,00 sedangkan Beban Persediaan-LO sebesar Rp3.700.638.073,00. Jadi terdapat selisih sebesar Rp1.794.477.817,00 yang disebabkan karena :

1. Pemakaian persediaan akhir tahun 2017 sebesar Rp480.464.870,00 yang menambah beban persediaan-LO.
2. Adanya persediaan akhir tahun 2018 sebesar Rp2.274.942.687,00 yang mengurangi beban persediaan-LO.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Belanja Persediaan LRA ke Beban Persediaan-LO

No	Beban Persediaan	LRA	Debet Jumlah	Kredit Jumlah	Beban LO
1	Beban Bahan Pakai Habis	3.898.327.890,00	117.099.660,00	1.524.983.877,00	2.490.443.673,00
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	57.013.600,00	-	-	57.013.600,00
3	Beban Cetak dan Penggandaan	1.539.774.400,00	363.365.180,00	749.958.780,00	1.153.180.800,00
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				-
Jumlah		5.495.115.890,00	480.464.840,00	2.274.942.657,00	3.700.638.073,00

Belanja Persediaan LRA ke Beban Persediaan-LO

No	Beban Persediaan	Debet			
		Pemakaian Persediaan th.2017	Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	Reclas Beban	Jumlah
1	Beban Bahan Pakai Habis	117.099.690,00			117.099.690,00
2	Beban Persediaan Bahan/ Material				-
3	Beban Cetak dan Penggandaan	363.365.180,00			363.365.180,00
4	Barang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				-
Jumlah		480.464.870,00	-	-	480.464.870,00

Belanja Persediaan LRA ke Beban Persediaan-LO

No	Belanja Persediaan	Kredit				
		Persediaan th.2018	Belanja yg dikapitalisasi ke Aset Tetap	Belanja yg dikapitalisasi ke Aset Lain	Reclas Beban	Jumlah
1	Beban Bahan Pakai Habis	1.524.983.907,00				1.524.983.907,00
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	-				-
3	Beban Cetak dan Penggandaan	749.958.780,00				749.958.780,00
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat					-
Jumlah		2.274.942.687,00	-	-	-	2.274.942.687,00



- 2) **Beban Jasa - LO** tahun 2018 sebesar Rp2.139.468.023,00 sedangkan beban jasa –LO tahun 2017 adalah Rp1.278.712.791,00 mengalami kenaikan sebesar Rp860.755.232,00 atau 67,31 persen jika dibandingkan dengan Beban Jasa-LO tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Beban Jasa - LO

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Jasa Kantor	356.303.023,00	195.847.341,00	160.455.682,00
2	Beban Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	5.700.000,00	(2.200.000,00)
3	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.062.000,00	6.000.000,00	(3.938.000,00)
4	Beban Jasa Konsultasi	122.236.000,00	33.900.000,00	88.336.000,00
5	Beban Honorarium Non Pegawai	51.820.000,00	19.020.000,00	32.800.000,00
6	Beban Honorarium PNS - LO	387.350.000,00	284.820.000,00	102.530.000,00
7	Beban Honorarium Non PNS - LO	1.201.197.000,00	725.585.000,00	475.612.000,00
8	Beban Barang dibawah Kapitalisasi	-	7.840.450,00	(7.840.450,00)
9	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.000.000,00	-	15.000.000,00
Jumlah		2.139.468.023,00	1.278.712.791,00	860.755.232,00

Belanja Jasa-LRA sebesar Rp2.191.539.227,00 sedangkan Beban Jasa-LO sebesar Rp2.139.468.023,00. Jadi terdapat selisih sebesar Rp52.071.204,00 yang dikarenakan karena :

1. Utang beban selama tahun 2018 sebesar Rp13.067.225,00 yang menambah beban jasa-LO.
2. Utang beban tahun sebelumnya yang dibayarkan pada tahun 2018 sebesar Rp16.403.429,00 yang mengurangi beban jasa-LO.
3. Beban jasa kantor yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap sebesar Rp27.450.000,00 sehingga mengurangi beban jasa-LO.
4. Belanja jasa konsultansi yang dikapitalisasi ke dalam aset lain-lain sebesar Rp. 19.965.000,00 sehingga mengurangi beban jasa-LO.



5. Belanja honorarium pns yang dikapitalisasi ke dalam aset lain-lain sebesar Rp.1.320.000,00 sehingga mengurangi beban jasa-LO.

Belanja Jasa-LRA ke Beban Jasa - LO

No	Uraian	LRA	Debet	Kredit	LO
			Jumlah	Jumlah	
1	Beban Jasa Kantor	387.089.227,00	13.067.225,00	43.853.429,00	356.303.023,00
2	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00			3.500.000,00
3	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.062.000,00	-	-	2.062.000,00
4	Beban Jasa Konsultasi	142.201.000,00	-	19.965.000,00	122.236.000,00
5	Beban Honorarium Non Pegawai	51.820.000,00	-	-	51.820.000,00
6	Beban Honorarium PNS - LO	388.670.000,00	-	1.320.000,00	387.350.000,00
7	Beban Honorarium Non PNS - LO	1.201.197.000,00	-	-	1.201.197.000,00
8	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
Jumlah		2.191.539.227,00	13.067.225,00	65.138.429,00	2.139.468.023,00

Belanja Jasa-LRA ke Beban Jasa - L

No	Uraian	DEBET			Kredit		LO
		Utang Beban tahun 2018	Belanja modal yg tidak dikapitalisasi	Jumlah	Utang Beban tahun sebelumnya yang dibayar tahun 2018	Bl. Barang & jasa yg dikapitalisasi ke Aset Tetap	
1	Beban Jasa Kantor	13.067.225,00		13.067.225,00	16.403.429,00	27.450.000,00	(30.786.204,00)
2	Beban Sewa Sarana Mobilitas			-		-	-
3	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			-		-	-
4	Beban Jasa Konsultasi			-		19.965.000,00	(19.965.000,00)
5	Beban Honorarium Non Pegawai			-		-	-
7	Beban Honorarium PNS - LO			-		1.320.000,00	(1.320.000,00)
8	Beban Honorarium Non PNS - LO			-		-	-
9	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS			-		-	-
Jumlah		13.067.225,00	-	13.067.225,00	16.403.429,00	48.735.000,00	(52.071.204,00)

- 3) **Beban Pemeliharaan-LO** tahun 2018 sebesar Rp209.465.925,00 mengalami kenaikan sebesar Rp66.156.350,00 atau 46,16 persen jika dibandingkan dengan Beban-Pemeliharaan LO tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:



No	Uraian	Tahun 2018	2017	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	46.729.925,00	47.419.125,00	(689.200,00)
2	Beban Pemeliharaan	162.736.000,00	95.890.450,00	66.845.550,00
	Jumlah	209.465.925,00	143.309.575,00	66.156.350,00

Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp209.465.925,00 sedangkan Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp209.465.925,00. Tidak terdapat selisih antara belanja pemeliharaan -LRA dan Beban Pemeliharaan - LO.

- 4) **Beban Perjalanan Dinas-LO** tahun 2018 sebesar Rp842.902.326,00 sedangkan beban perjalanan dinas - LO tahun 2017 sebesar Rp686.740.794,00. Beban perjalanan dinas-LO mengalami kenaikan sebesar Rp156.161.532,00 atau sebesar 22,74 persen jika dibandingkan dengan Beban-Perjalanan Dinas- LO tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Beban Perjalanan Dinas - LO

No	Uraian	Tahun 2018	2017	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	389.007.054,00	388.145.250,00	861.804,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	453.895.272,00	298.595.544,00	155.299.728,00
	Jumlah	842.902.326,00	686.740.794,00	156.161.532,00

Belanja Perjalanan Dinas-LRA sebesar Rp842.902.326,00 sedangkan Beban Perjalanan Dinas - LO sebesar Rp842.902.326,00. Tidak terdapat selisih antara Belanja Perjalanan Dinas-LRA dan Beban Perjalanan Dinas -LO.



3. **Beban bunga** sebesar Rp0,00
4. **Beban Subsidi** sebesar Rp0,00
5. **Beban Hibah** sebesar Rp0,00
6. **Beban Bantuan Sosial** sebesar Rp0,00
7. **Beban Penyusutan dan Amortisasi** tahun 2018 sebesar Rp881.027.208,00 mengalami kenaikan sebesar Rp206.925.838,19 atau 30,70 persen jika dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2017 sebesar Rp674.101.361,19. Beban penyusutan tahun 2018 untuk dapat dilihat dalam table berikut :

Beban Penyusutan tahun 2018

No	SKPD	Jumlah
1	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	11.871.429,00
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	110.771.971,00
3	Beban Penyusutan Alat Ukur	78.417,00
4	Beban Penyusutan Alat Kantor	108.257.407,00
5	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	129.464.783,00
6	Beban Penyusutan Komputer	420.435.510,00
7	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.599.023,00
8	Beban Penyusutan Alat Studio	24.198.981,00
9	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	3.550.362,00
10	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	63.875.009,00
11	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	2.924.316,00
	Jumlah	881.027.208,00

8. **Beban Penyisihan Piutang** sebesar Rp0,00
 9. **Beban Lain-lain** sebesar Rp00,00
- b. **Beban Transfer.....Rp0,00**
Beban Transfer terdiri dari Beban Transfer Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa, dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya, dan Beban Transfer Dana Otonomi Khusus. Beban Transfer pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tahun 2018 sebesar Rp 00,00



c. Defisit Non OperasionalRp00,00

Defisit Non Operasional terdiri dari Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, Defisit dari kegiatan Non Operasional-LO. Defisit Non Operasional-LO tahun 2018 sebesar Rp00,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 100 persen jika dibandingkan dengan Defisit Non Operasional tahun 2017 sebesar Rp0,00.

d. Beban Luar Biasa..... Rp00,00

Beban Luar Biasa sebesar Rp 00,00 adalah beban yang terdapat pada SKPD BPPKAD selaku PPKD yang merupakan belanja tidak terduga di LRA.

SURPLUS/(DEFISIT)-LO.....Rp(12.001.251.658,00)



3.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal tahun 2018, penambahan surplus atau pengurangan defisit yang berasal dari Laporan Operasional tahun berjalan serta dampak kumulatif karena koreksi perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas awal pada tahun 2018 terdapat saldo awal ekuitas sebesar Rp7.087.061.516,01 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2017.
2. Surplus/defisit adalah surplus yang berasal dari Laporan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tahun 2018 sebesar Rp(12.001.251.658,00). Defisit ini merupakan defisit atas kegiatan operasional yang mengurangi ekuitas neraca.
3. Ekuitas akhir pada tahun 2018 terdapat saldo akhir ekuitas sebesar Rp8.747.630.991,01 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2018.



3.4 NERACA

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Penjelasan lebih lanjut tentang Laporan Keuangan Neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2018 dan 2017 (dalam Rupiah) adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Aset Lancar	2.274.942.687,00	480.464.870,00
Investasi Jangka Panjang	-	-
Aset Tetap	6.317.942.282,00	6.527.367.341,00
Dana Cadangan	-	-
Aset Lainnya	169.005.737,01	96.080.436,01
Jumlah Aset	8.761.890.706,01	7.103.912.647,01
Kewajiban Jangka Pendek	14.259.715,00	16.851.131,00
Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Jumlah Kewajiban	14.259.715,00	16.851.131,00
Jumlah Ekuitas	8.747.630.991,01	7.087.061.516,01
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	8.761.890.706,01	7.103.912.647,01

Penjelasan dari masing-masing pos neraca diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. ASET.....Rp8.761.890.706,01

Nilai Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2017 sebesar Rp7.103.912.647,01 sedangkan nilai asset per 31 Desember 2018 sebesar Rp8.761.890.706,01 yang terdiri dari:

A. Aset LancarRp2.274.942.687,00

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dapat dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal pelaporan neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat diperinci sebagai berikut:



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Aset Lancar	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1 Kas di Kas Daerah	-	-
2 Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
3 Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
4 Kas di BLUD	-	-
5 Kas di Bendahara FKTP	-	-
6 Kas di Bendahara Bos	-	-
7 Investasi Jangka Pendek	-	-
8 Piutang Pajak	-	-
9 Penyisihan Piutang Pajak	-	-
10 Piutang Retribusi	-	-
11 Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
12 Piutang Lainnya	-	-
13 Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
14 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
15 Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
16 Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
17 Persediaan	2.274.942.687,00	480.464.870,00
Jumlah	2.274.942.687,00	480.464.870,00

1. Kas.....Rp0,00

Saldo kas pada Neraca terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. Kas pada Neraca dapat diperincian sebagai berikut:

Kas	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
Kas di Kas Daerah	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

a) Kas di Kas Daerah.....Rp0,00

Saldo Kas di Kas Daerah pada tahun 2017 sebesar Rp0,00, sedangkan Kas Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 yang terdiri atas penempatan berupa giro dan deposito pada Bank, dengan rincian saldo sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah:	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
1) Rekening Giro	-	-
2) Rekening Deposito	-	-
Jumlah	-	-



1) Rekening Giro.....Rp0,00

Rekening giro bank adalah dana yang merupakan bagian dari kekayaan milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro. Rekening giro per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00, sedangkan rekening giro per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Adapun rincian dari rekening giro per 31 Desember 2018 adalah sebagaimana berikut:

<i>Rekening Giro:</i>	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
Bank BPD Jateng Cab Purwodadi No. 1-017-00343-9	-	-
Jumlah	-	-

Dari rekening giro tersebut diatas penggunaan adalah sebagai berikut:

Rekening giro Bank BPD Jateng Cabang Purwodadi A/C No.1-017-00343-9 atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan merupakan rekening Kas Penerimaan APBD Kabupaten Grobogan.

2) Deposito.....Rp0,00

Deposito Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00, sedang kan jumlah deposito per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.

b) Kas di Bendahara Pengeluaran.....Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Kas (uang) tunai maupun jumlah Kas (uang) yang berada di rekening bank bendahara pengeluaran SKPD per 31 Desember 2018. Kas di Bendahara pengeluaran tahun 2017 sebesar Rp0,00, adapun pada tahun 2018 saldo kas di bendahara pengeluaran SKPD sebesar Rp0,00 sebagaimana tabel berikut:



	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

c) Kas di Bendahara Penerimaan.....Rp0,00

Pada tahun 2017 kas bendahara penerimaan sebesar Rp0,00, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp0,00 Kas bendahara penerimaan tahun 2018 berupa kas di bendahara penerimaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan yang merupakan pendapatan lain-lain pendapatan yang sah akhir Desember 2018.

2. Piutang Pajak.....Rp0,00

Akun Piutang Pajak menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pajak daerah yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum diterima pembayarannya dari wajib pajak. Saldo piutang pajak pada tahun 2017 sebesar Rp0,00.

3. Piutang Retribusi.....Rp0,00

Akun piutang retribusi menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pengenaan retribusi daerah yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum diterima pembayarannya. Pada tahun 2017 piutang retribusi tercatat sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 sebelum penyisihan adalah sebesarRp0,00.

4. Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan ngsuranRp0,00

Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah merupakan hak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan yang belum diterima pembayarannya.

5. Piutang Dana Bagi Hasil.....Rp0,00

Piutang kepada pemerintah pusat adalah merupakan piutang kurang salur atas dana bagi hasil pajak pusat ke daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Grobogan tidak mengelola piutang dana bagi hasil.

6. Penyisihan Piutang.....Rp0,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tidak mengelola penyisihan piutang.

7. Persediaan.....Rp2.274.942.687,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jumlah persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp480.464.870,00 sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp2.274.942.687,00 dengan rincian sebagai berikut:

<i>Persediaan</i>	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1 ATK/Pakai Habis	1.524.518.907,00	116.712.690,00
2 Meterai dan Perangko	465.000,00	387.000,00
3 Barang Cetakan	749.958.780,00	363.365.180,00
Jumlah	2.274.942.687,00	480.464.870,00

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (*opname*) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pengurus barang, sesuai dengan Berita Acara Stock Opname Persediaan Barang Pakai Habis Nomor : 050/.../2018 Tanggal 31 Desember 2018. Dari hasil audit BPK RI Perwakilan Jawa Tengah terdapat koreksi kurang catat alat tulis kantor sebesar Rp149.825.500,00 dan lebih catat barang cetakan sebesar (Rp98.368.075,00) atau sebesar Rp51.457.425,00 sehingga persediaan per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp2.274.942.687,00

B. Investasi Jangka Panjang.....Rp0,00



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tidak mengelola Investasi Jangka Panjang.

C. Aset Tetap.....Rp6.317.942.282,00

Dalam laporan keuangan aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap ini mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya, sedangkan Pengertian Aset Tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang tercantum dalam neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2017 sebesar Rp6.527.367.341,00 Aset tetap tersebut pada tahun 2018 turun menjadi Rp6.317.942.282,00 yang merupakan akumulasi nilai aset tetap per 31 Desember 2017 audited ditambah dengan penambahan aset tahun 2018 dikurangi dengan pengurangan aset tahun 2018.

Pada tahun 2018 terdapat mutasi bersih Aset Tetap sebesar Rp388.775.765,06 Yang terdiri atas penambahan nilai Aset Tetap sebesar Rp695.792.450,00 dan pengurangan nilai Aset Tetap sebesar Rp307.016.684,94 Penambahan dan Pengurangan nilai Aset Tetap tersebut terdiri atas:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Penambahan aset tetap dari belanja	695.792.450,00
2	Penerimaan aset dari donasi/hibah	-
3	Penambahan aset mutasi masuk dari SKPD lain	-
4	Penambahan aset tetap yang belum tercatat	-
5	Kapitalisasi dari belanja barang/jasa	-
6	Koreksi pembukuan yang menambah nilai aset	-
	Jumlah	695.792.450,00

Sedangkan pengurangan nilai Aset Tetap terdiri atas:



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Penghapusan aset tetap	-
2	Pengurangan aset karena dihibahkan ke masyarakat	-
3	Pengurangan karena dibawah nilai kapitalisasi	-
4	Mutasi ke SKPD lain	-
5	Reklasifikasi keluar ke akun lain yang mengubah jumlah total aset tetap	307.016.684,94
6	Koreksi pembukuan yang mengurangi nilai aset	-
7	Pengurangan karena validasi lainnya	-
	Jumlah	307.016.684,94

Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut:

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
a. Penambahan Aset Tetap:							
1. Dari belanja	-	695.792.450,00	-	-	-	-	695.792.450,00
2. Dari Hibah	-	-	-	-	-	-	-
3. Mutasi masuk dari SKPD lain	-	-	-	-	-	-	-
4. Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-	-	-	-	-	-	-
5. Kapitalisasi	-	-	-	-	-	-	-
6. Koreksi pembukuan	-	-	-	-	-	-	-
7. Dari dana BOS	-	-	-	-	-	-	-
8. Validasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	-	695.792.450,00	-	-	-	-	695.792.450,00
b. Pengurangan Aset Tetap:							
1. Penghapusan aset tetap	-	-	-	-	-	-	-
2. Dihibahkan ke	-	-	-	-	-	-	-
3. Dibawah nilai kapitalisasi	-	-	-	-	-	-	-
4. Mutasi ke SKPD lain	-	-	-	-	-	-	-
5. Reklasifikasi	-	307.016.684,94	-	-	-	-	307.016.684,94
6. Koreksi pembukuan	-	-	-	-	-	-	-
7. Validasi lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	-	307.016.684,94	-	-	-	-	307.016.684,94
Jumlah mutasi bersih	-	388.775.765,06	-	-	-	-	388.775.765,06

C.1 Tanah..... Rp320.000.000,00



Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang tercatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun diatas tanah tersebut. Pada neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tahun 2017 tercatat nilai tanah sebesar Rp320.000.000,00 sedangkan pada tahun 2018 nilai tanah tersebut menjadi Rp320.000.000,00. Penjelasan atas mutasi tanah selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Saldo awal (Neraca Th. 2017)	320.000.000,00
Penambahan Tanah:	
1. Dari belanja	-
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Reklasifikasi	-
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	-
Pengurangan Tanah:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilangkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	-
Jumlah mutasi bersih	-
Saldo akhir (Neraca Th. 2018)	320.000.000,00

C.2 Peralatan dan Mesin..... Rp5.529.050.165,25

Peralatan dan Mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat



umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi pengolahan dan pemurnian, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi. Pada tahun 2017 aset tetap peralatan dan mesin pada neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tercatat sebesar Rp5.140.274.400,19 sedangkan pada tahun 2018 nilai peralatan dan mesin tersebut naik menjadi Rp5.529.050.165,25. Penjelasan atas mutasi peralatan dan mesin selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Saldo awal (Neraca Th. 2017)	5.140.274.400,19
Penambahan Peralatan dan Mesin:	
1. Dari belanja	695.792.450,00
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Reklasifikasi	-
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	695.792.450,00
Pengurangan Peralatan dan Mesin:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilangkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	307.016.684,94
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	307.016.684,94
Jumlah mutasi bersih	388.775.765,06
Saldo akhir (Neraca Th. 2018)	5.529.050.165,25



Mutasi bersih peralatan dan mesin selama tahun 2018 sebesar Rp388.775.765,06 diperoleh dari Penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp695.792.450,00 dan Pengurangan peralatan dan mesin sebesar Rp307.016.684,94. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan terdapat penambahan peralatan dan mesin dari belanja modal sebesar Rp695.792.450,00. Disamping penambahan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan juga terdapat pengurangan peralatan dan mesin sebesar Rp307.016.684,94 yang berupa pengurangan aset reklasifikasi ke aset lain-lain karena rusak berat.

C.3 Gedung dan Bangunan Rp3.390.764.500,00

Definisi dari gedung dan bangunan menurut UU nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Gedung dan Bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Pada tahun 2017 aset tetap gedung dan bangunan pada neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tercatat sebesar Rp3.390.764.500,00 sedangkan pada



tahun 2018 nilai gedung dan bangunan tersebut tetap sebesar Rp3.390.764.500,00. Penjelasan atas mutasi gedung dan bangunan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Saldo awal (Neraca Th. 2017)	3.390.764.500,00
Penambahan Gedung dan Bangunan:	
1. Dari belanja	-
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Kapitalisasi	-
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	-
Pengurangan Gedung dan Bangunan:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilangkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	-
Jumlah mutasi bersih	-
Saldo akhir (Neraca Th. 2018)	3.390.764.500,00

Mutasi bersih gedung dan bangunan selama tahun 2018 sebesar Rp0,00 tidak ada penambahan dari belanja modal bangunan gedung.

C.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan..... Rp115.350.540,00

Definisi Jalan, Irigasi, dan Jaringan menurut PSAP nomor 07 Paragraf 11 menyatakan bahwa Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi/jenis Jalan, Irigasi, dan Jaringan ini antara lain Jalan dan Jembatan, bangunan air, instalasi, dan Jaringan. Pada tahun 2017 aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada neraca Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tercatat sebesar Rp115.350.540,00 sedangkan pada tahun 2018 nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut tetap menjadi Rp115.350.540,00. Penjelasan atas mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Saldo awal (Neraca Th. 2017)	115.350.540,00
Penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan:	
1. Dari belanja	-
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Reklasifikasi	-
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	-
Pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilangkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	-
Jumlah mutasi bersih	-
Saldo akhir (Neraca Th. 2018)	115.350.540,00

C.5 Aset Tetap Lainnya..... Rp2.500.000,00

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/budaya/olahraga. Pada tahun 2017 aset tetap lainnya pada neraca Pemerintah Kabupaten Grobogan tercatat sebesar Rp2.500.000,00 sedangkan pada tahun 2018 nilai aset tetap lainnya tersebut tetap menjadi Rp2.500.000,00. Penjelasan atas mutasi aset tetap lainnya selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Saldo awal (Neraca Th. 2017)	2.500.000,00
Penambahan Aset Tetap Lainnya:	
1. Dari belanja	-
2. Dari Hibah	-
3. Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4. Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5. Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Dari dana BOS	-
8. Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	-
Pengurangan Aset Tetap Lainnya:	
1. Penghapusan aset tetap	-
2. Dihilangkan ke masyarakat	-
3. Dibawah nilai kapitalisasi	-
4. Mutasi ke SKPD lain	-
5. Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	-
Jumlah mutasi bersih	-
Saldo akhir (Neraca Th. 2018)	2.500.000,00

C.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan..... Rp0,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Pada tahun 2017 Konstruksi Dalam Pengerjaan pada neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tercatat sebesar Rp0,00. Penjelasan atas mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Saldo awal (Neraca Th. 2017)	-
Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan:	
1. Dari belanja	-
2. Koreksi pembukuan	-
3. Dari dana BOS	-
4. Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	-
Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan:	
1. Penghapusan aset tetap	-
2. Reklasifikasi	-
3. Koreksi pembukuan	-
4. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	-
Jumlah mutasi bersih	-
Saldo akhir (Neraca Th. 2018)	-

C.7 Akumulasi Penyusutan Rp3.039.722.923,25



Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.441.522.099,19 sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp3.039.722.923,25. Akumulasi aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Pada tahun 2016 berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2014 perhitungan penyusutan aset tetap yang dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan tarif penyusutan dilakukan secara tahunan (per tahun), selanjutnya pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Perhitungan penyusutan aset tetap berubah menjadi secara bulanan (per bulan). Dengan perubahan tersebut maka akan terjadi selisih nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2017 (audited) yang dihitung per tahun dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2018 yang dihitung per bulan. Selisih tersebut telah dilakukan penyesuaian dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 khususnya dalam penyusunan neraca awal untuk akun akumulasi penyusutan. Adapun perhitungan jumlah selisih tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

NOMOR	URAIAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31-12-2017 (PER TAHUN)	PENYESUAIAN AKUMULASI PENYUSUTAN		PENYUSUTAN TAHUN 2018	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31-12-2018
			BERTAMBAH	BERKURANG		
1	Peralatan dan Mesin	2.275.595.899,19	12,00	282.826.395,94	814.227.883,00	2.806.997.398,25
2	Gedung dan Bangunan	153.752.658,00	-	-	63.875.009,00	217.627.667,00
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	12.173.542,00	-	-	2.924.316,00	15.097.858,00
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah	2.441.522.099,19	12,00	282.826.395,94	881.027.208,00	3.039.722.923,25

Selain aset tetap sebagaimana dijelaskan diatas, terdapat barang-barang *extracountable*, yaitu barang-barang yang



memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, namun nilainya dibawah nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Saldo barang-barang *extracountable* per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp17.197.655,12 sedangkan pada tahun 2018 sama sebesar Rp17.197.655,12 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2017
1	Peralatan dan Mesin	17.197.655,12	17.197.655,12
2	Gedung dan Bangunan	-	-
3	Aset Tetap Lainnya	-	-
	Jumlah	17.197.655,12	17.197.655,12

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tidak terdapat penambahan barang-barang extracountable.

D. Dana CadanganRp0,00

E. Aset Lainnya..... Rp169.005.737,01

Aset lainnya merupakan asset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai asset lancar, investasi jangka panjang, asset tetap, atau dana cadangan. Jumlah Aset Lainnya tahun 2017 sebesar Rp96.080.436,01 sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp169.005.737,01 yang terdiri atas tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, aset lain-lain. Penambahan nilai aset lainnya berasal dari koreksi pembukuan yang dengan nilai aset lainnya yang ada di BMD, dan akumulasi aset lain-lain dengan rincian saldo sebagai berikut:

<i>Aset Lainnya:</i>	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
Aset Tidak Berwujud	138.480.200,00	89.745.200,00
Aset Lain-lain	30.525.537,01	6.335.236,01
	<u>169.005.737,01</u>	<u>96.080.436,01</u>



- 1. Tagihan Penjualan Angsuran.....Rp0,00**
Saldo tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tidak mengelola Tagihan Penjualan Angsuran.
- 2. Tuntutan Ganti Rugi.....Rp0,00**
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tidak mengelola Tuntutan Ganti Rugi.
- 3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga.....Rp0,00**
Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tidak mengelola Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
- 4. Aset Tidak Berwujud.....Rp138.480.200,00**
Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa yang akan datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk aset tidak berwujud yang telah tercatat di neraca sesuai dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan tidak dilakukan amortisasi (penyusutan), hal ini karena seluruh aset tidak berwujud yang telah tercatat tidak diketahui masa manfaatnya baik masa manfaat yang berkaitan dengan harapan entitas untuk menggunakan aset tidak berwujud tersebut maupun faktor hukum atau faktor ekonomis yang membatasinya seperti masa manfaat berdasarkan dokumen



perjanjian. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2017 sebesar Rp89.745.200,00 pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp138.480.200,00

Nama Software/Aplikasi	2018	2017
- Lisensi Pendukung Siak	-	-
- OS Server	6.365.051,00	6.365.051,00
- OS PC	1.768.070,00	1.768.070,00
- Ms Office	1.343.733,00	1.343.733,00
- Antivirus	454.646,00	454.646,00
- Aplikasi Pendaftaran Pelaksanaan Perda 4 Tahun 2014	22.421.700,00	22.421.700,00
- Aplikasi Simakdes	38.032.000,00	38.032.000,00
Aplikasi Pendaftaran Online (Update Simakdes)	9.710.000,00	9.710.000,00
Aplikasi SIMPEDA	9.650.000,00	9.650.000,00
Aplikasi Bunga Rampai Permasalahan Kependudukan	20.625.000,00	-
Pengembangan Aplikasi dan Pengamanan Database Server	28.110.000,00	-
	138.480.200,00	89.745.200,00

Penjelasan atas mutasi aset tidak berwujud selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Saldo awal (Neraca Th. 2017)	89.745.200,00
Penambahan Aset Tidak Berwujud:	
1. Dari belanja	-
2. Dari Hibah	-
3. Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4. Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5. Reklasifikasi	48.735.000,00
6. Koreksi pembukuan	-
7. Dari dana BOS	-
8. Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	48.735.000,00
Pengurangan Aset Tidak Berwujud:	
1. Penghapusan aset tetap	-
2. Dihilangkan ke masyarakat	-
3. Dibawah nilai kapitalisasi	-
4. Mutasi ke SKPD lain	-
5. Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	-
Jumlah mutasi bersih	48.735.000,00
Saldo akhir (Neraca Th. 2018)	138.480.200,00

Mutasi bersih aset tidak berwujud selama tahun 2018 sebesar Rp48.735.000,00.

5. Aset Lain-lain.....Rp393.700.868,28

Asset lain-lain digunakan untuk mencatat asset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud



dan kemitraan dengan pihak ketiga. Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain, dimana aset ini dinilai sebesar menurut nilai tercatatnya. Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 sebesar Rp86.684.183,34 dan pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp393.700.868,28. Aset Lain-lain ini adalah merupakan aset dalam kondisi rusak berat yang telah diajukan usulan penghapusannya dan menunggu untuk penetapan surat keputusan penghapusan, aset rusak berat diatas berupa aset tetap peralatan mesin. Penjelasan atas mutasi aset lain-lain selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Saldo awal (Neraca Th. 2017)	86.684.183,34
Penambahan Aset Lainnya:	
1. Dari belanja	-
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Reklasifikasi	307.016.684,94
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	307.016.684,94
Pengurangan Aset Lainnya:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilangkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	-
Jumlah mutasi bersih	307.016.684,94
Saldo akhir (Neraca Th. 2018)	393.700.868,28

Mutasi bersih aset lainnya selama tahun 2018 sebesar Rp307.016.684,94 diperoleh dari koreksi pembukuan aset lainnya.

6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (Rp363.175.330,94)



Akumulasi penyusutan asset lain-lain pada tahun 2017 sebesar (Rp80.348.947,00) sedangkan tahun 2018 menjadi (Rp363.175.330,94). Akumulasi penyusutan aset lain-lain tersebut merupakan reklas dari penyusutan aset tetap yang dalam kondisi rusak berat, kemudian dipindah ke aset lainnya.

2. KewajibanRp14.259.715,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2017 sebesar Rp16.851.131,00. Kewajiban tersebut mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi sebesar Rp14.259.715,00 yang terbagi ke dalam kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang sebagaimana rincian berikut:

<i>Kewajiban:</i>	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1 Kewajiban Jangka Pendek	14.259.715,00	16.851.131,00
2 Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	<u>14.259.715,00</u>	<u>16.851.131,00</u>

1. Kewajiban Jangka Pendek.....Rp14.259.715,00

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tahun 2017 sebesar Rp16.851.131,00 sedangkan pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp14.259.715,00 yang meliputi Utang Beban sebagaimana rincian berikut:

<i>Kewajiban Jangka Pendek:</i>	31 Desember 2018	31 Desember 2017
a Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
b Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
c Pendapatan diterima dimuka	-	-
d Utang Beban	14.259.715,00	16.851.131,00
e Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	<u>14.259.715,00</u>	<u>16.851.131,00</u>

a. Utang Perhitungan Pihak KetigaRp0,00



Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2018 merupakan bagian dari Kas yang menjadi hak (klaim) pihak ketiga.

b. Utang BebanRp14.259.715,00

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 terdiri dari rincian:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Utang Beban Telepon	Rp 186.130,00
2	Utang Beban Air/PDAM	Rp 551.900,00
3	Utang Beban Listrik	Rp 11.768.445,00
4	Utang Beban Kawat/Internet/Intranet	Rp 560.750,00
5	Utang Beban Gaji	Rp 1.192.490,00
Jumlah		Rp 14.259.715,00

2. Kewajiban Jangka Panjang.Rp0,00

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban lainnya yang bukan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, adapun saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00

3. Ekuitas.....Rp8.747.630.991,01

Ekuitas adalah menunjukkan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Ekuitas pada neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tahun 2017 sebesar Rp7.087.061.516,34 dan pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp8.696.173.566,01. Penjelasan lebih lanjut mengenai ekuitas diuraikan pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

<i>Ekuitas Dana:</i>	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1 Ekuitas	8.747.630.991,01	7.087.061.516,01
Jumlah Ekuitas Dana	8.747.630.991,01	7.087.061.516,01



BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

4.1 Letak geografis Kabupaten Grobogan dan peta bencana yang mempunyai dampak sosial

Kabupaten Grobogan, adalah salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan Ibukota di Purwodadi. Secara geografis terletak di 110°15' BT – 111°25' BT dan 7° LS - 7°30' LS, serta di antara dua pegunungan Kendeng utara dan Pegunungan Kendeng Selatan. Sedangkan batas wilayah Kabupaten Grobogan di sebelah barat adalah Kabupaten Semarang dan Demak, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kudus, Pati dan Blora, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blora dan Ngawi, sementara di selatan berbatasan dengan Kabupaten Sragen, Boyolali, dan Kabupaten Semarang.

Dengan luas wilayah sebesar 1.975,865 Km² dan secara administratif terdiri 19 kecamatan, 273 desa dan 7 kelurahan serta 1.451 dusun/lingkungan. Kecamatan terbesar adalah Kecamatan Geyer dengan luas 196,19 Km² (9,9%), sedangkan yang terkecil Kecamatan Klambu dengan luas 46,56 Km² (2,2%). Jumlah penduduk menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan yang telah divalidasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tertib Administrasi Kependudukan, pada akhir tahun 2013 sebesar 1.402.760 jiwa, dengan mata pencaharian penduduk didominasi pada jenis mata pencaharian pertanian dan perdagangan.

Target Pencapaian SPM Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 secara regional di tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Penerbitan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 – 18 Tahun sebesar 91 %
2. Pelayanan Penerbitan Kepemilikan Akta Kematian sebesar 33.032
3. Pelayanan Penerbitan Kepemilikan Kartu Keluarga sebesar 98,82 %
4. Pelayanan Penerbitan KTP Elektronik sebesar 96,45 %



Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan telah mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), selain itu Dinas Kependudukan telah mendapatkan Sertifikat ISO 9001-2015 Managemen Mutu Pelayanan Dokumen Kependudukan.

4.2 Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar 49 orang terdiri dari:

1. Pegawai Golongan I sebesar 1 orang
2. Pegawai Golongan II sebesar 17 orang
3. Pegawai Golongan III sebesar 22 orang
4. Pegawai Golongan IV sebesar 9 orang

Rincian PNS sampai dengan 31 Desember 2018 berdasarkan Golongan/Ruang, Eselon, Tenaga Fungsional, dan Staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018

Golongan	ESELON					Fungsional	Staf	Total
	I	II	III	IV	V			
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	-	1	-	-	-	-	-	1
IV/b	-	-	1	-	-	-	-	1
IV/a	-	-	3	4	-	-	-	7
Jumlah Gol. IV	-	1	4	4	-	-	-	9
III/d	-	-	-	4	-	-	1	5
III/c	-	-	-	4	-	-	1	5
III/b	-	-	-	-	-	-	9	9
III/a	-	-	-	-	-	-	4	4
Jumlah Gol. III	-	-	-	8	-	-	15	23
II/d	-	-	-	-	-	-	7	7
II/c	-	-	-	-	-	-	6	6
II/b	-	-	-	-	-	-	3	3
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol. II	-	-	-	-	-	-	16	16



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

I/d	-	-	-	-	-	-	1	1
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol. I	-	-	-	-	-	-	1	2
Jumlah PNS	-	1	4	12	-	-	32	49

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan



BAB V

PENUTUP

Dari uraian sebagaimana tersebut pada Bab I, II, III, dan IV, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan ini merupakan Laporan Keuangan audited yang disusun sesuai dengan penerapan basis akrual sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
2. Ikhtisar pencapaian pendapatan sebesar Rp0,00 lebih rendah Rp0,00 atau 0,00 persen jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp0,00.
3. Ikhtisar pencapaian belanja dan transfer sebesar Rp13.661.821.133,00 lebih rendah (Rp638.966.503,00) atau 4,47 persen jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp14.300.787.636,00.
4. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp0,00 dan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp13.661.821.133,00; maka terjadi Defisit Anggaran pada TA 2018 sebesar (Rp13.661.821.133,00). Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Netto) pada TA 2018 adalah sebesar (Rp0,00) yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp0,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00. Terjadinya Surplus Anggaran dan adanya realisasi Pembiayaan Netto mengakibatkan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIkPA) TA 2018 sebesar (Rp13.661.821.133,00).
5. Pada Laporan Operasional per 31 Desember 2018, jumlah Pendapatan-LO sebesar Rp0,00 dan jumlah Beban sebesar Rp12.001.251.658,00.
6. Pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018, Ekuitas Awal sebesar Rp7.087.061.516,01 dan Ekuitas Akhir sebesar Rp8.747.630.991,01



7. Pada Laporan Neraca per 31 Desember 2018, jumlah Aset sebesar Rp8.761.890.706,01 dibandingkan dengan Neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp7.103.912.647,01 atau mengalami peningkatan sebesar 23,34 persen. Jumlah Aset tersebut terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp2.274.942.687,00 Investasi Jangka Panjang sebesar Rp0,00 Aset Tetap sebesar Rp6.317.942.282,00 Dana Cadangan sebesar Rp0,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp169.005.737,34 Sedangkan untuk Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp8.761.890.706,01 terdiri dari Kewajiban sebesar Rp14.259.715,00 Ekuitas sebesar Rp8.747.630.991,01.

Dari kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan sampai dengan akhir tahun 2018 ini tidak luput dari kekurangan. Hal ini tentu saja akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan agar kekurangan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diminimalisir pada tahun-tahun mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan mampu menjadi pemacu peningkatan kualitas dan kreatifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Grobogan untuk tahun berikutnya.

Purwodadi, 2019
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB.GROBOGAN

MOCH. SUSILO, SH, MM
NIP. 19650908 199103 1 005